

SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI

(Studi Kasus Putusan Nomor :68/PID.B/2015/PN.MKS)



NOVI PURI ASTUTY

B 111 12 189

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

HALAMAN JUDUL

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA ABORSI**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.Mks)

OLEH:

NOVI PURI ASTUTY

B 111 12 189

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian
Studi Sarjana dalam Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2016

PERSETUJUAN MENEMPUPH UJIAN SKRIPSI

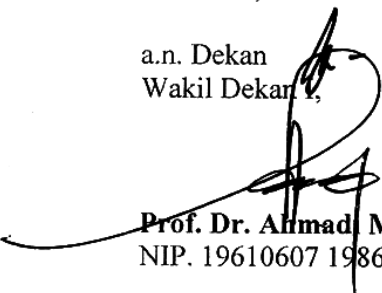
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : **NOVI PURI ASTUTY**
No. Pokok : B111 12 189
B a g i a n : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan
No.68/Pid.B/2015/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2016

a.n. Dekan
Wakil Dekan,


Prof. Dr. Ahmad Miru, S.H.,M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

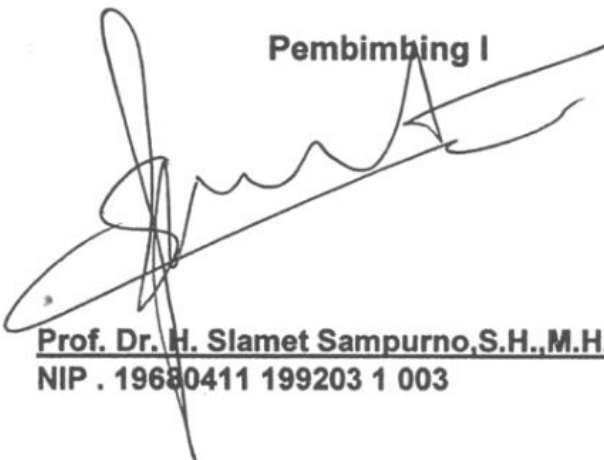
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **NOVI PURI ASTUTI**
Nomor Induk : **B 111 12 189**
Bagian : **HUKUM PIDANA**
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
(Studi Kasus Putusan No:68/Pid.B/2015/PN.Mks)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

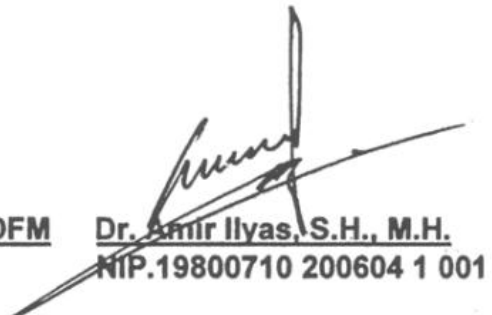
Makassar, Januari 2016

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Slamet Sampurno, S.H., M.H., DFM
NIP . 19680411 199203 1 003

Pembimbing II



Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP.19800710 200604 1 001

PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI
(Studi Kasus Putusan PN Makassar No.68/Pid.B/2015/PN.MKS)

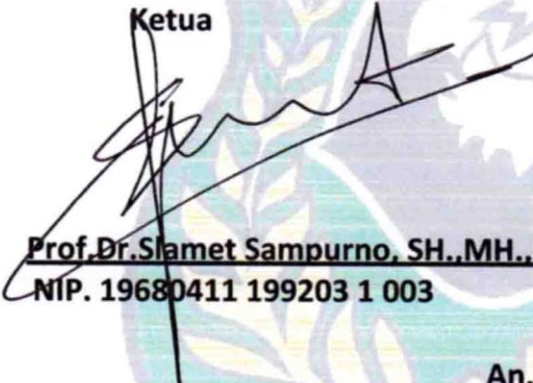
Disusun dan diajukan oleh

NOVI PURI ASTUTY
B11112189

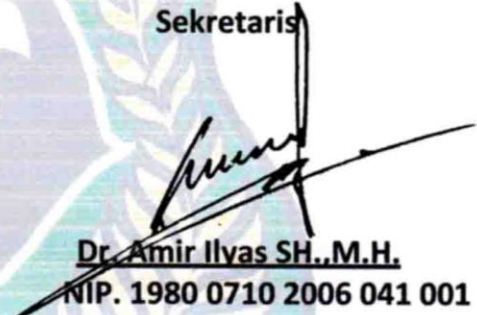
Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Pidana
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 3 Maret 2016
Dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

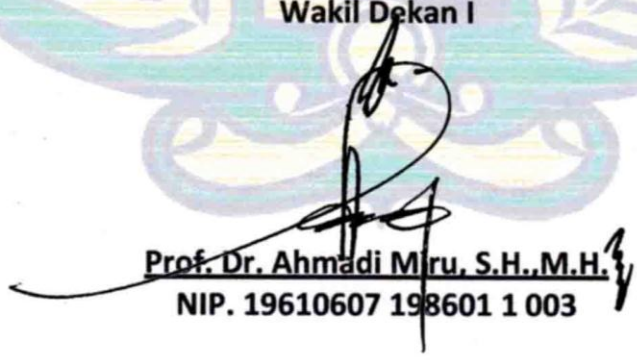
Ketua


Prof. Dr. Slamet Sampurno, SH.,MH.,DFM.
NIP. 19680411 199203 1 003

Sekretaris


Dr. Amir Ilvas SH.,M.H.
NIP. 1980 0710 2006 041 001

**An. Dekan
Wakil Dekan I**


Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

ABSTRAK

NOVI PURI ASTUTY (B 111 12 189) “PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI” (Studi Kasus Putusan Nomor : 68/Pid.B/2015/PN.Mks). Di bimbing oleh Bapak **Slamet Sampurno selaku pembimbing I dan Bapak **Amir Ilyas** selaku pembimbing II.**

Penelitian ini bertujuan mengetahui dua hal yaitu bagaimanakah pertanggung jawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi, dan yang kedua, bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

Dalam penulisan ini Penulis menggunakan penelitian hukum untuk memperoleh bahan atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Peneliti tersebut ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif.

Dari penelitian yang dilakukan, Penulis mendapatkan hasil sebagai berikut : pertama, bentuk dari pertanggung jawaban pelaku pada tindak pidana aborsi dalam perkara pidana Nomor: 68/Pid.B/2015/PN.Mks yang harus di tanggung oleh terdakwa yaitu harus menjalankan pidana penjara akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya berupa pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan, menetapkan masa penahanan yang telah dijalannya oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sebab perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara terang-terangan telah dilarang oleh perundang undangan. Sesuai dengan kejahatan dan perbuatan yang dilakukannya terdakwa dikenakan pasal 348 KUHP. Dan kedua, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, hakim berdasarkan pada dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, hakim beranggapan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana aborsi.

ABSTRAC

NOVI PURI Astuty (B 111 12 189) "Criminal liability You Against Perpetrators of the Crime of abortion " (Case Study of Decision No. 68 / Pid.B / 2015 / PN.Mks) . Guided by Mr. Slamet Sampurno as Supervisor I and Mr. Amir Elias as the Supervisor II .

In this paper the author uses legal research to obtain any materials or collect a variety of data , facts and information required . The study aimed to get an objective law .

From the research conducted , the author get the following results : first , forms of accountability on the perpetrators of the crime of abortion in a criminal case No. 68 / Pid.B / 2015 / PN.Mks that shall be paid by the defendant which must be run as a result of imprisonment of the act of doing . The defendant must be accountable for his actions in the form of imprisonment for 7 (seven) months , set the period of detention that have been lived by the defendant deducted entirely from the sentence imposed

For the acts committed by the accused openly been ' prohibited by laws and regulations. In accordance with the act of doing the crime and the defendant subject to Article 348 Criminal Code . And secondly , consideration of the judge in the verdict , the judge based on two items of evidence , namely the testimony of witnesses and the testimony of the defendant , and Based on the facts revealed in court , the judge considered that the defendant is guilty of the crime of abortion .

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya kehadirat Allah SWT karena atas berkah dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan judul “ Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks) sebagai persyaratan bagi mahasiswa *Universitas Hasanuddin Makassar guna memperoleh gelar serjana Hukum*. Tak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat beliau yang senagtiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim diseluruh dunia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senagtiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan duka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril dan materil demi terwujudnya skripsi ini.

Penulis menghaturkan terima kasih setinggi-tingginya kepada orang tua tercinta, Ayahanda **Darwis Abdullah** dan ibunda **Fatmawati** yang selalu mendoakan dan mendukung Penulis serta selalu mendampingi dalam suka dan duka. Tak lupa juga kepada kakak Penulis, **Aprilla, Julianto** dan seluruh keluarga Penulis, yang selalu memberi asupan semangat dan dukungan kepada Penulis.

Dan tak lupa Penulis haturkan banyak terima kasih kepada :

1. **Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina, MA.** Selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan **Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajarannya.
2. **Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.H.** selaku ketua bagian Hukum Pidana dan **Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H.** selaku sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. **Bapak Prof. Dr. H. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.** selaku Pembimbing I dan **Bapak Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.** selaku Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih untuk segala bimbingan dan nasehat-nasehat kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. **Bapak Prof. Dr. A. Sofyan, S.H., M.H.,** **Bapak Prof.Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,** Ibu Selaku tim penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi **Dr.Haeranah, S.H.,M.H.**Penulis. Terima kasih atas segala saran dan masukan demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.
5. **Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H.** selaku penasihat Akademik Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan kepada Penulis ilmu yang sangat bermanfaat.
7. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Sahabat Penulis yang selalu menemani hingga sekarang **Nur Ainun, Hj.Riskia Ikhsan, Annisa Arsal, Hj.Sahriani, Reski**

Wahyuni, Ayu Putri Aditya, Rahmi Sri Juliani, Zakiah, Ade Anggreani, Ahmad Akbar, dan Aan Restu yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Senior saya **Kanda Ardiansyah Kadow, S.H.** yang membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi.
10. Sahabat-sahabat SMA Penulis : **Adiyanto, Zainuddin Abdullah, H.akki, Reski edo, A.Tini, Nurmi Khadijah, Masnita, Putra Jalal,** dan lain-lain yang tidak sempat saya tulis namanya, yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Kampus Penulis **Novi Pury, Satria Heryanto, Agus Muliadi, A.M Siryan, Afif Fadly, Andy, Triandy Anugrah, Rahmat Islami, Muhammad Akbar, Fajar Hardiman, Marif Nurdin, Adhi Dharma, Andi Amidudin, Danyal Asfekar, Muh.Ainun Najib, Jack, Upi, Dasril, Fachrul Setiadi, Yudha, Dirga** yang telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman **Keluarga Besar Lorong Hitam (KBLH)** yang selalu mendukung Penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Teman-teman dan Senior-senior **ALSA Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.**
14. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angkatan 90 di Kabupaten Sidrap, Kecamatan Maritengngae, khususnya pada **Pio Gusman, A.M. Siryan, Indah Uyun, Ekha, Rahmat , Cicas** yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

15. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, khususnya teman-teman PETITUM 2012, atas kebersamaannya selama ini, karena kalian penulis mendapatkan pengalaman yang sangat berarti dan berharga selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

16. Teman-teman dari SD, SMP, SMA, dan semua teman tanpa terkecuali, terimakasih atas dukungan dalam bentuk apapun kepada penulis.

17. Dan seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Harapan penulis pada akhirnya, semoga skripsi ini dapat saya pertanggungjawabkan serta dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum. Di samping itu saran dan kritik tetap Penulis butuhkan dari pembaca untuk lebih membangun masa depan.

Makassar, Januari 2016



Novi Puri Astuti

DAFTAR ISI

HalamanJudul	i
LembarPengesahan.....	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
1.Tujuan Penelitian	
2. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana9
1. Pengertian Tindak Pidana.....	..9
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
3. Jenis- Jenis Tindak Pidana.....	19
B. Pertanggungjawaban Pidana.....	24
1. Kesalahan	25
a. Dolus.....	25
b.Culpa.....	31
2. Kemampuan Bertanggung Jawab	33
C. Aborsi	35
1. Pengertian Aborsi	35
2. Aborsi Menurut KUHP.....	35
3. Aborsi Menurut UU Kesehatan.....	35
4. Aborsi Menurut PP NO.61 Tahun 2014	40
D. Jenis Aborsi.....	43
E. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi.....	43

F. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara.....	46
---	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	51
B. Jenis dan Sumber Data	51
C. Teknik Pengumpulan Data	52
D. Analisis Data	53

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam Putusan Nomor. 68/Pid.B/2014/PN.Mks	
1. Posisi Kasus	52
2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi.....	54
3. Analisi Penulis	56
B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Aborsi Nomor. 68/Pid.B/2014/PN.Mks.	
1. Pertimbangan Hakim	61
2. Analisis Penulis	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan pada era globalisasi dan modernisasi pada saat ini sangat berdampak negatif pada para remaja yang tidak mampu melakukan penyaringan terhadap kebudayaan asing yang bersifat liberal. Imbas dari perkembangan zaman Para remaja kurang mampu memilah-milah antara yang patut diterima serta sesuai dengan kepribadian bangsa dan masyarakat maupun yang tidak. Salah satu aspek yang menjadi kekhawatiran saat ini adalah kebebasan atau hilangnya batas-batas normatif yang menyangkut hubungan seksual sebelum memasuki hubungan pernikahan.

Pergaulan bebas dikalangan remaja merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya, di antaranya adalah mudahnya para remaja dalam mengakses media yang bermuatan pornografi baik diinternet, majalah maupun VCD porno kurangnya pengetahuan remaja terhadap dampakseks bebas, minimnya pengawasan orang tua dan faktor fisik remaja yang sedang mengalami pubertas, sehingga keingintahuan mereka tentang seks mengalami peningkatan. Kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa fenomena pergaulan remaja yang melampaui batas norma kesusilaan berakibat pada terjadinya kehamilan di luar nikah. Pada perkembangan selanjutnya remaja putri memilih untuk menggugurkan

kandungannya (aborsi) sebagai jalan keluar untuk mengatasi kehamilan diluar nikah tersebut.

Fenomena gaya hidup seks bebas di kalangan remaja menggambarkan bahwa para remaja cenderung hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa memikirkan sebab-akibat kedepannya. Pada awalnya para anak muda tersebut hanya berpacaran biasa, akan tetapi karena pengaruh dari faktor gaya hidup seks bebas tersebut mereka melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka. Ketika hubungan mereka membuahkan janin dalam kandungannya, timbul masalah karena mereka belum menikah dan kebanyakan masih harus menyelesaikan sekolah atau kuliahnya.

Ditambah adanya rasa takut ketahuan dan rasa malu apabila masalah kehamilan itu ketahuan oleh orang tua dan orang lain, maka ditempuh aborsi untuk menghilangkan janin yang tidak dikehendaki tersebut. Aborsi (*abortus*) adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin, apabila janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur. Pengertian aborsi lainnya adalah terjadi keguguran janin, melakukan aborsi sebagai melakukan penguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu). Berbicara mengenai aborsi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena aborsi erat kaitannya dengan wanita dan janin yang ada dalam kandungannya wanita. Hal ini dikarenakan aborsi sudah menjadi hal

yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana dan bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu dilakukan secara legal ataupun dilakukan secara ilegal.

Hukum positif di Indonesia mengatur masalah menjelaskan bahwa aborsi ini sebagai salah satu jenis tindak pidana, sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai berikut:

Pasal 346 KUHP :

"Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun."

Pasal 347 KUHP:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 348 KUHP:

- 1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP:

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan

sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Berdasarkan keempat pasal tersebut diatas maka berarti bahwa apapun alasannya diluar alasan medis perempuan tidak boleh melakukan tindakan aborsi. Dengan kata lain paradigma yang digunakan adalah paradigma yang mengedepankan hak anak, sehingga dalam KUHP tindakan aborsi dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Adapun yang dapat dikenai sanksi pidana berkaitan dengan perbuatan aborsi adalah perempuan yang menggugurkan kandungan yaitu sendiri dan juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti dokter, bidan atau juru obat serta orang yang menyuruh melakukan tindak pidana aborsi. Persoalannya adalah bagaimana ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditegakkan dengan baik sehingga dapat menjerakan dan meminimalisasikan para pelaku kejahatan aborsi tersebut.

Aborsi merupakan fenomena sosial yang memperhatikan dan keperihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku pengguguran kandungan menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut norma moral suatu kehidupan bangsa. Dalam sistem hukum di Indonesia, perbuatan aborsi dilarang dilakukan dan dikategorikan sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 346 – 349 KUHP, sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman. Oleh karena itu, dibutuhkan penegakan hukum yang sungguh-sungguh dari aparat penegak hukum di Indonesia. Penegakan

hukum ini harus diintensifkan mengingat buruknya akibat aborsi yang tidak hanya menyebabkan kematian bayi yang diaborsi, tetapi juga ibu yang melakukan aborsi.

Menurut Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. Ada beberapa hal yang dapat dicermati dari jenis aborsi ini yaitu bahwa ternyata aborsi dapat dibenarkan secara hukum apabila dilakukan dengan adanya pertimbangan medis. Dalam hal ini berarti dokter atau tenaga kesehatan mempunyai hak untuk melakukan aborsi dengan menggunakan pertimbangan demi menyelamatkan ibu hamil atau janinnya. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, tindakan medis (aborsi) sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.

Aborsi tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. Hal tersebut berarti bahwa apabila prosedur tersebut telah terpenuhi maka aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan dan dilindungi secara hukum. Dengan kata lain vonis medis oleh tenaga kesehatan terhadap hak reproduksi perempuan bukan merupakan tindak pidana atau kejahatan. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan dengan jelas bahwa pemerintah wajib melindungi

dan mencegah perempuan dari aborsi yang dilakukan dengan ilegal atau yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya dengan aborsi yang dilakukan tanpa adanya pertimbangan medis sebagaimana diatur Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, aborsi jenis ini disebut dengan aborsi *provocatus kriminalis*. Artinya bahwa tindakan aborsi seperti ini dikatakan tindakan ilegal atau tidak dapat dibenarkan secara hukum. Tindakan aborsi merupakan tindakan pidana atau kejahatan, yang oleh KUHP dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap nyawa. Kasus tindak pidana aborsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muh ismail Damies dalam Putusan PN Nomor 68/Pid.B/2015/PNMks yang telah dijatuhkan hukuman bersalah oleh Pengadilan Negeri Makassar, karena Ismail Damies melanggar Pasal 348 Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP). Muh Ismail Damies tertangkap ketika saksi mendapatkan informasi bahwa di Rumah Sakit Bayangkara Makassar ada sepasang muda mudi telah melakukan aborsi dan dalam perawatan selanjutnya. Dan terdakwa Muh Ismail Damies dijatuhkan penjara selama tujuh bulan. Permasalahan dalam putusan tersebut adanya kesenjangan antara pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa aborsi dalam Putusan PN Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks yaitu selama tujuh bulan penjara dengan ketentuan pada Pasal 348 KUHP yang menyatakan bahwa :

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan penelitian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi di Makassar (Studi Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks ?
- b. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks

- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi.

- b. Kegunaan Praktis

- 1. Untuk dapat memberikan informasi yang benar tentang tindak pidana aborsi dan peran Kejaksaan Kota Makassar serta Polresta Makassar dalam menangani kasus Tindak Pidana Aborsi di Makassar.
- 2. Sebagai bahan pertimbangan bagi wanita yang akan melakukan tindak pidana aborsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana.

a. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) :

Dengan istilah *stratbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Moeljatno berpendapat bahwa:

"Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Sehubungan dengan hal pengertian tindak pidana ini

Bambang Poernomo, berpendapat bahwa

Perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “Aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, Prof.DR. Bambang Poernomo, SH, juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaarfeit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaarfeit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya, juga oleh karena sebagian besar kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengan-tengan masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan hakim agar dijatuhi pidana.

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (Principle of legality) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:

- Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
- Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
- Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (dolus) dan kealpaan (culpa) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (schuld) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.

Adami Chazawi menyatakan bahwa :

Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaarfeit*. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur-literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana.

Pompe, Merumuskan *Strafbaarfeit* (Tindak Pidana) adalah :

Suatu pelanggaran kaidah (pengangguan ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemedanaannya adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum

Hezewinkel Suringa (P.A.F. Lamintang, 1997:181) mendefinisikan *strafbaarfeit* sebagai :

suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Sementara itu, menurut Van Hammel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:224) bahwa

“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-Undang melawan hukum, *strafwardig* (patut atau bernilai untuk pidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*enaan schuld tewijten*)”.

Dari banyaknya istilah tentang *strafbaarfeit* penulis lebih sepakat untuk memakai istilah tindak pidana, dengan alasan bahwa istilah tindak pidana bukan lagi menjadi istilah awam bagi masyarakat Indonesia dan telah digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam kita menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkan sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau Culpa);
2. Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijckheid;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Seorang ahli hukum yaitu simons merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut. Diancam dengan pidana oleh hukum

1. Bertentangan dengan hukum
2. Dilakukan oleh orang yang bersalah
3. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Sementara menurut Moeljatno unsur-unsur perbuatan pidana :perbuatan (manusia)Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil) Bersifat melawan hukum (syarat materiil) Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari :

Kelakuan dan akibat Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi :

- Unsur subyektif atau pribadi Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat (1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak mungkin diterapkan pasal tersebut
- Unsur obyektif atau non pribadi Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak mungkin diterapkan pasal ini
- Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan. Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 165, 531 KUHP

Pasal 164 KUHP :

barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam, di ancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Kewajiban untuk melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.

Pasal 531 KUHP :

barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Keharusan memberi pertolongan pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan pidana, kalau orang yang dalam keadaan

bahaya tadi kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) tetapi sebagai syarat penuntutan.

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana Misalnya penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP), dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjadi 7 tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana.

Unsur melawan hukum Dalam perumusan delik unsur ini tidak selalu dinyatakan sebagai unsur tertulis. Adakalanya unsur ini tidak dirumuskan secara tertulis rumusan pasal, sebab sifat melawan hukum atau sifat pantang dilakukan perbuatan sudah jelas dari istilah atau rumusan kata yang disebut. Misalnya pasal 285 KUHP : “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar perkawinan”.

Tanpa ditambahkan kata melawan hukum setiap orang mengerti bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah pantang dilakukan atau sudah mengandung sifat melawan hukum. Apabila dicantumkan maka jaksa harus mencantumkan dalam dakwaannya dan oleh karenanya harus dibuktikan. Apabila tidak dicantumkan maka apabila perbuatan yang didakwakan dapat

dibuktikan maka secara diam-diam unsure itu di anggap ada. Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis misalnya pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Pentingnya pemahaman terhadap pengertian unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang “pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi yang memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum.

Bagi Jaksa pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah :

- Untuk menyusun surat dakwaan, agar dengan jelas; Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian / penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi;

- Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;
- Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana;
- Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil-dalil yang digunakan dalam pembuktian akan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah;
- Menyusun requisitoir yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka pengertian-pengertian unsur tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi.

C. Jenis-jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

KUHP tidak memberikan kriteria tentang dua hal tersebut, hanya membaginya dalam buku II dan buku III, namun ilmu pengetahuan

mencari secara intensif ukuran (kriterium) untuk membedakan kedua jenis delik itu.

Ada dua pendapat :

- a. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan ukuran ini lalu didapati 2 jenis delik, ialah :

1. **Recht delicten**

Ialah yang perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam ini disebut “kejahatan” (*mala perse*).

2. **Wets delicten**

Ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik, jadi karena ada undang-undang mengancamnya dengan pidana. Misal : memarkir mobil di sebelah kanan jalan (*mala quia prohibita*). Delik-delik semacam ini disebut “pelanggaran”. Perbedaan secara kualitatif ini tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang pidana, jadi sebenarnya tidak segera dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada “pelanggaran”, yang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan. Oleh karena perbedaan secara demikian itu tidak memuaskan maka dicari ukuran lain.

- b. Ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kuantitatif. Pendirian ini hanya meletakkan kriterium pada perbedaan yang dilihat dari segi kriminologi, ialah “pelanggaran” itu lebih ringan dari pada “kejahatan”.

b. Delik formil dan delik materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)

- a. Delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misal :

penghasutan (pasal 160 KUHP), di muka umum menyatakan perasaan kebencian, permusuhan atau penghinaan kepada salah satu atau lebih golongan rakyat di Indonesia (pasal 156 KUHP); penyuapan (pasal 209, 210 KUHP); sumpah palsu (pasal 242 KUHP); pemalsuan surat (pasal 263 KUHP); pencurian (pasal 362 KUHP).

- b. Delik materiil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Kalau belum maka paling banyak hanya ada percobaan. Misal : pembakaran (pasal 187 KUHP), penipuan (pasal 378 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP). Batas antara delik formil dan materiil tidak tajam misalnya pasal 362.

c. Delik commisionis, delik ommisionis dan delik commisionis per ommisionen commissa

- a. Delik commisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, ialah berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
- b. Delik ommisionis : delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan / yang diharuskan, misal : tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (pasal 531 KUHP).
- c. Delik commisionis per ommisionen commissa : delik yang berupa pelanggaran larangan (dus delik commissionis), akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Misal : seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu (pasal 338, 340 KUHP), seorang penjaga wissel yang menyebabkan kecelakaan kereta api dengan sengaja tidak memindahkan wissel (pasal 194 KUHP).

d. Delik dolus dan delik culpa (doleuse en culpose delicten)

- a. Delik dolus : delik yang memuat unsur kesengajaan, misal : pasal-pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP

- b. Delik culpa : delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur misal : pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat 4 dan pasal 359, 360 KUHP.

e. Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengestelde delicten*)

- a. Delik tunggal : delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
- b. Delik berangkai : delik yang baru merupakan delik, apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, misal : pasal 481 (penadahan sebagai kebiasaan)

f. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai (*voordurende en aflopende delicten*)

Delik yang berlangsung terus : delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus, misal : merampas kemerdekaan seseorang (pasal 333 KUHP).

g. Delik aduan dan delik laporan (*klachtdelicten en niet klacht delicten*)

Delik aduan : delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena (*gelaedeerde partij*) misal : penghinaan (pasal 310 dst. jo 319 KUHP) perzinahan (pasal 284 KUHP), chantage (pemerasan dengan ancaman pencemaran, ps. 335 ayat 1 sub 2 KUHP jo. ayat 2). Delik aduan dibedakan menurut sifatnya, sebagai :

- a. Delik aduan yang absolut, ialah mis. : pasal 284, 310, 332. Delik-delik ini menurut sifatnya hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan.
- b. Delik aduan yang relative ialah mis. : pasal 367, disebut relatif karena dalam delik-delik ini ada hubungan istimewa antara si pembuat dan orang yang terkena.

Delik laporan: delik yang penuntutannya dapat dilakukan tanpa ada pengaduan dari pihak yang terkena, cukup dengan adanya laporan yaitu pemberitahuan tentang adanya suatu tindak pidana kepada polisi.

h. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya / peringannya (*eenvoudige dan gequalificeerde / geprevisiëerde delicten*)

Delik yang ada pemberatannya, misal : penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang (pasal 351 ayat 2, 3 KUHP), pencurian pada waktu malam hari dsb. (pasal 363). Ada delik yang ancaman pidananya diperingan karena dilakukan dalam keadaan tertentu, misal : pembunuhan kanak-kanak (pasal 341 KUHP). Delik ini disebut “geprivelegeerd delict”. Delik sederhana; misal : penganiayaan (pasal 351 KUHP), pencurian (pasal 362 KUHP).

i. Delik ekonomi (biasanya disebut tindak pidana ekonomi) dan bukan delik ekonomi

Apa yang disebut tindak pidana ekonomi itu terdapat dalam pasal 1 UU Darurat No. 7 tahun 1955, UU darurat tentang tindak pidana ekonomi.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (*asasculpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strictliability*). Masalah kesesatan (*error*) baik kesesatan mengenai keadaannya (*error facti*) maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut

dipersalahkan. Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana memulihkan keseimbangan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

1. Kesalahan

Ilmu hukum pidana mengenal dua bentuk kesalahan, yaitu *kesengajaan atau dolus* dan *kealpaan atau culpa*. Sebagian besar pasal-pasal dalam KUHP membuat kesalahan dalam bentuk kesengajaan dengan menggunakan berbagai rumusan, di samping beberapa tindak pidana yang dilakukan dengan kealpaan, misalnya saja pada Pasal 359 dan 360 KUHP yang sering diterapkan di dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Beberapa bentuk kesalahan yaitu :

a. Kesengajaan (dolus)

Dolus dalam bahasa Belanda disebut *opzet* dan dalam bahasa Inggris disebut *intention* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sengaja atau kesengajaan. Pertama-tama perlu diketahui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan *opzet*. Walaupun demikian, pengertian *opzet* ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian peristiwa pidana disamping peristiwa yang mempunyai unsur *culpa*. (Kansil 2004:51)

KUHP sendiri tidak menjelaskan pengertian kesengajaan dan kealpaan itu. Oleh Memori van Toeliching dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *willens en watens* yang artinya adalah menghendaki dan *menginsyafi atau mengetahui* atau secara agak lengkap seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus menginsyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya.

Mengenai kealpaan, hanya sekedar dilaskan bahwa kealpaan atau culpa adalah *kebalikan dari dolus disatu pihak dan kebalikan dari kebetulan dipihak lain*. Kiranya kata kebalikan adalah kurang tepat, karena kebalikan putih bukan selalu hitam.

Unsur kesengajaan dan kealpaan ini hanay berlsku untuk kejahatan dan tidak untuk pelanggaran. Mengenai pengertian menghendaki tersebut, kehendak itu dapat ditujukan kepada :

1. Perbuatannya yang dilarang.
2. Akibatnya yang dilarang.
3. Keadaan yang merupakan unsur tindak pidana.

Kesengajann yang hanya ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal, sedangkan yang ditujukan kepada akibatnya adalah kesengajaan material.

Ada pakar-pakar hukum pidana yang mengatakan bahwa tidak mungkin seseorang itu menghendaki akibat,karena paling banter orang

hanya bias membayangkan akibat, sebab mungkin terdapat faktor-faktor X yang berada diluar kekuasaanya yang memengaruhi hubungan sebab akibat itu. Oleh karena itu, terdapat teori-teori dalam hal ini, yaitu:

1. Teori Kehendak (*von Hippel*)

Teori ini mengatakan bahwa inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Artinya bahwa pelaku kejahatan berkehendak melakukan perbuatan yang dipidana hukum dan menginginkan akibatnya. Teori ini adalah yang paling kuat.

Dari penjelasan dan teori di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan disengaja adalah *menghendaki dan mengetahui perbuatan yang dilakukan, yang mana perbuatan itu dipidana secara hukum, serta menghendaki akibat dari perbuatan tersebut*. ([http:// kesalahan-dalam-hukum-pidana](http://kesalahan-dalam-hukum-pidana)).

Menurut teori ini sengaja adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dan kehendak untuk menimbulkan suatu akibat karena perbuatannya itu. Dengan perkataan lain dapat dikatakan sebagai sengaja apabila suatu perbuatan itu dikehendaki, dan akibat perbuatan itu benar-benar menjadi maksud dari perbuatan yang dilakukan.

2. Teori Membayangkan (Frank)

Teori ini mengatakan bahwa sengaja berarti mengetahui dan dapat membayangkan kemungkinan akan akibat yang timbul dari perbuatannya tanpa ada kehendak atau maksud untuk akibat tersebut.

Menurut teori ini berdasarkan alasan psikologis tidak mungkin suatu akibat itu dapat dikehendaki. Manusia hanya bias menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan akibat yang akan terjadi. Dirumuskan bahwa sengaja adalah apabila suatu akibat dibayangkan sebagai maksud, dan oleh karena itu perbuatan tersebut dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan bayangan yang telah dibuatnya lebih dahulu.

Terhadap teori-teori ini Van Hattum mengatakan bahwa pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara keduanya. Perbedaannya tidak terletak di bidang yuridis melainkan dibidang psikologis. Keduanya mengakui bahwa didalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat. Soedarto mengatakan didalam praktik penggunaan keduanya sama saja, yang berbeda hanya terminologi dan istilahnya saja.

a. Corak kesengajaan

Ditinjau dari sikap batin pelaku, terdapat tiga corak kesengajaan :

1. Kesengajaan Sebagai Maksud (*dolus directus*).

Corak kesengajaan ini adalah yang paling sederhana, yaitu perbuatan pelaku memang dikehendaki dan ia juga menghendaki (atau membayangkan) akibatnya yang dilarang. Kalau akibat yang dikehendaki

atau dibayangkan ini tidak akan ada, ia tidak akan melakukan perbuatan.

- Ditinjau sebagai delik formas hal ini berarti bahwa ia sudah melakukan perbuatan itu dengan sengaja, sedang perbuatan itu memang dikehendaki atau dimaksud demikian.
- Ditinjau sebagai delik materiil hal ini berarti bahwa akibat kematian orang lain itu memang dikehendaki atau dimaksudkan agar terjadi.

2. Kesengajaan dengan Sadar Kepastian

Corak kesengajaan dengan sadar kepastian bersandar kepada akibatnya. Akibat itu dapat merupakan delik tersendiri ataupun tidak. Tetapi disamping akibat tersebut ada akibat lain yang tidak dikehendaki yang pasti akan terjadi.

3. Kesengajaan dengan Sadar Kemungkinan (dolus eventualis)

Corak kesengajaan dengan sadar kemungkinan ini kadang-kadang disebut sebagai kesengajaan dengan syarat. Pelaku berbuat dengan menghendaki atau membayangkan akibat tertentu sampai disini hal itu merupakan kesengajaan sebagai maksud tetapi disamping itu mungkin sekali terjadi akibat lain yang dilarang yang tidak dikehendaki atau dibayangkan.

Ilmu hukum mengenal beberapa jenis kesengajaan, yaitu:

- *Dolus premeditatus* yaitu dolus yang direncanakan, sehingga di rumuskan dengan istilah dengan rencana lebih dahulu (*meet voorbedachte raad*) untuk ini perlu ada waktu untuk memikirkan dengan tenang, pembuktiannya disimpulkan dari keadaan yang objektif.
- *Dolus determinatus* dan *dolus indeterminatus*, yang pertama adalah kesengajaan dengan tujuan yang pasti, misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang yang kedua kesengajaan yang tanpa tujuan tertentu atau tujuan acak (*rendom*), misalnya menembakkan senjata kea rah sekelompok orang, memasukkan racun ke dalam reservoir air minum.
- *Dolus alternativus*, yaitu kesengajaan menghendaki sesuatu tertentu atau yang lainnya (alternatifnya) juga akibat yang lain.
- *Dolus indirectus*, yaitu kesengajaan melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat yang tidak diketahui oleh pelakunya misalnya, didalam perkelahian seseorang memukul lawannya tanpa maksud untuk membunuh.
- *Dolus directus*, yaitu kesengajaan yang ditujukan bukan hanya kepada perbuatannya saja, melainkan juga pada akibatnya.

Dolus generalis, yaitu kesengajaan di mana pelaku menghendaki akibat tertentu, dan untuk itu ia telah melakukan beberapa tindakan, misalnya untuk melakukan pembunuhan, mula-mula lawannya dicekik, kemudian

dilemparkan ke sungai, karena mengira lawannya telah mati. (Teguh Prasetyo 2011:97-106).

b. Culpa atau Kealpaan

Arti kata culpa atau kelalaian ini ialah kesalahan pada umumnya, akan tetapi culpa pada ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis yaitu suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga secara tidak sengaja sesuatu terjadi. KUHP tidak menegaskan apa arti kealpaan sedang Vos menyatakan bahwa culpa mempunyai dua unsur yaitu:

1. Kemungkinan pendugaan terhadap akibat.
2. Tidak berhati-hati mengenai apa yang diperbuat atau tidak diperbuat.

Bentuk kesalahan yang kedua adalah kealpaan atau culpa. Keterangan resmi pembentuk KUHP mengenai persoalan mengapa culpa juga diancam dengan pidana, walaupun dengan ringan, adalah bahwa berbeda dengan kesengajaan atau dolus yang sifatnya menentang larangan justru dengan melakukan perbuatan yang dilarang. Beberapa pakar memberikan pengertian atau syarat culpa sebagai berikut:

Menurut Simons mempersyaratkan dua hal :

1. tidak adanya kehati-hatian.
2. kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin terjadi.

Menurut Van Hamel ada dua syarat yaitu :

1. tidak adanya penduga-duga yang diperlukan.
2. tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.

Bentuk-bentuk kealpaan :

1. kealpaan yang disadari (bewuste), seseorang melakukan sesuatu perbuatan yang sudah dapat di bayangkan akibat buruk akan terjadi, tapi tetap melakukannya.
2. kealpaan yang tidak disadari, bila pelaku tidak dapat membayangkan sama sekali akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang seharusnya di bayangkan.

Analisis dari kesalahan dalam hukum pidana adalah yaitu pengertian kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi yang berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur delik karena perbuatan kerana kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum. Sedangkan unsur-unsur kesalahan yaitu Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (dolus) maupun karna kealpaan (culpa). Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. Bentuk kesalahan yaitu dolus yang tidak dirumuskan dalam KUHP tetapi dijadikan unsur sebagai peristiwa pidana disamping peristiwa yang punya unsur culpa. Culpa atau

kelalaian suatu macam kesalahan sebagai akibat kurang berhati-hati sehingga tidak disengaja sesuatu terjadi.

kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana, berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Unsur-unsur kesalahan yaitu, kesalahan adalah pertanggung jawaban dalam hukum, adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal. adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*), tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan. Bentuk kesalahan yaitu *dolus* dan *culpa*.

2. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Bila tidak dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan. Apabila hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan dua syarat yaitu:

- a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (*idiotie*), yang mungkin ada sejak kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.
- b) Syarat psikologis ialah gangguan jiwa itu harus pada waktu si pelaku melakukan perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak dapat dikenai hukuman kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana

dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

C. Aborsi

1. Pengertian Aborsi

Aborsi bahasa Latin: *abortus* adalah berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat (hidup) sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran prematur. Pengertian Aborsi menurut kamus umum Bahasa Indonesia aborsi didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin, melakukan aborsi sebagai melakukan penguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi yang dikandung itu).

2. Aborsi menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah:

- a. Pengeluaran hasil konsepsi pada setiap stadium perkembangannya sebelum masa kehamilan yang lengkap tercapai (38-40 minggu)

- b. Pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan (berat kurang dari 500gram atau kurang dari 20minggu). Dari segi medikolegal maka istilah abortus, keguguran dan kelahiran premature mempunyai arti yang sama dan menunjukkan pengeluaran janin sebelum usia kehamilan yang cukup.

3. Aborsi Menurut Undang-Undang Kesehatan

Aborsi menurut Undang-Undang Kesehatan aborsi dibahas secara tersirat pada Pasal 15 (1) Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Maksud dari kalimat tindakan medis tertentu salah satunya adalah aborsi.

Pengertian Aborsi menurut Ilmu Kedokteran adalah kehamilan berhenti sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan kematian janin. Apabila janin lahir selamat sebelum 38 minggu namun setelah 20 minggu, maka istilahnya adalah kelahiran premature. Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah aborsi. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Didalam dunia kedokteran ada berbagai jenis aborsi, diantaranya aborsi spontan atau alamiah, berlangsung tanpa tindakan

apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Aborsi buatan atau sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak). Aborsi Terapeutik atau Medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi mempunyai penyakit darah tinggi menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan baik calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Tetapi ini semua atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa.

Aborsi bisa dikatakan legal apabila dilaksanakan dengan sepengetahuan pihak yang berwenang yaitu dari pihak keluarga, dokter yang ahli dalam bidangnya dan kepolisian. Prinsip aborsi itu sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu, untuk aborsi karena alasan medis menggunakan obat atau melalui kuret. Teknik-teknik aborsi yang bisa dilakukan secara legal atau diperbolehkan karena ada alasan medis yaitu:

1. Menggunakan obat

Obat ini biasanya digunakan sebelum usia kehamilan mencapai 20 minggu dan harus dokter yang melakukan, karena jika dilakukan sembarangan bisa menimbulkan komplikasi dan bahkan dapat membahayakan ibunya. Kalau tidak ada pengawasan bisa berbahaya bisa

menyebabkan ibunya meninggal, karena itu biasanya diobservasi terlebih dahulu di rumah sakit dan dilihat selama 24 jam. Umumnya obat yang diberikan pada ibu yang akan aborsi ini berfungsi untuk merangsang timbulnya kontraksi. Meski begitu pemberian obat ini berdasarkan resep dokter dan harus dibawah pengawasan.

2. Menggunakan teknik kuret

Untuk melakukan teknik ini dokter biasanya akan memberikan bius pada pasien, setelah itu hasil dari konsepsi antara sel telur dan sperma ini dikerok atau disedot, dan ini termasuk tindakan operasi kecil. Meski begitu tindakan ini juga memiliki komplikasi seperti risiko dari bius itu sendiri, infeksi, pendarahan, cedera organ seperti robek jika dilakukan dengan tidak tepat. Kalau dilakukan dengan dokter maka kondisinya bisa terkontrol dan efek sampingnya bisa menjadi minimal. Untuk itu teknik ini harus dilakukan oleh orang yang memang berkompeten, karena jika dilakukan sembarangan atau orangnya tidak kompeten bisa menyebabkan infeksi yang paling banyak, mandul serta kerusakan organ.

Aborsi dalam pelaksanaan prakteknya jarang sekali yang melakukan secara legal dikarenakan berbagai alasan. Sebagian besar perempuan melakukan aborsi secara ilegal dengan mengonsumsi jamu atau alat tertentu yang berbahaya. Aborsi menurut definisinya adalah pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Bagi wanita yang melakukan aborsi dengan cara

yang tidak sesuai dengan prosedur medis, maka dampaknya dapat sangat mengerikan. Bahkan kadang menimbulkan kematian atau juga rusaknya fungsi alat reproduksi wanita secara permanen. Itu tentu adalah kerugian yang sangat besar bagi pihak wanita. Mereka yang memilih aborsi dengan cara ilegal ini biasanya tidak menginginkan kehamilannya dengan alasan malu sebab belum menikah, atau alasan ekonomi, karena telah memiliki banyak anak di antara dampak mengerikan aborsi ilegal itu adalah:

1. Jika dilakukan menggunakan alat-alat tidak standart dan tajam misalnya lidi, ranting pohon atau yang lainnya, maka resiko rahim robek atau luka besar sekali.
2. Rahim yang lebih dari 3 kali diaborsi berisiko jadi kering, infeksi, atau bahkan memicu tumbuhnya tumor.
3. Aborsi ilegal yang dilakukan oleh orang yang tidak ahli, dapat menyebabkan proses kuret asi tidak bersih, hingga terjadi pendarahan hebat.
4. Peralatan yang tak steril akan memicu munculnya infeksi di alat reproduksi wanita, bahkan sampai ke usus.
5. Bagi pelaku, rasa berdosa yang timbul karena aborsi dapat menyebabkan mereka menderita depresi, berubah kepribadiannya jadi introvert, serta sering tak bisa menikmati hubungan seksual jika telah menikah.
6. Jika pelaku aborsi kelak hamil kembali dengan kehamilan yang diinginkan, maka kehamilan tersebut ada kemungkinan besar akan

bermasalah, atau janin dapat mengalami masalah pada mata, otak atau alat pencernaannya.

Tiga fakta utama tentang aborsi yang mengangkat aborsi sebagai masalah kesehatan masyarakat yang harus mendapatkan perhatian adalah:

1. Aborsi yang dilaksanakan secara tidak aman merupakan penyebab utama kesakitan dan kematian wanita.
2. Kebutuhan akan induksi aborsi merupakan kenyataan yang sering dan terus menerus dijumpai.
3. Wanita tidak perlu meninggal akibat aborsi tidak aman, oleh karena apabila induksi dilaksanakan secara benar dan higienis, tindakan aborsi sangatlah aman.

a. Aborsi Menurut PP NO.61 Tahun 2014

PP Nomor 61 Tahun mengatur tentang indikasi ke daruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, dimana pasal 31 ayat (1) menyatakan tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis; atau kehamilan akibat perkosaan. Ayat (2) menyatakan Tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Sedangkan Indikasi kedaruratan medis meliputi: kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu dan kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan

janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.

D. Jenis-Jenis Aborsi

Klasifikasi abortus atau aborsi berdasarkan dunia kedokteran, yaitu:

1. Abortus spontanea

Abortus spontanea merupakan abortus yang berlangsung tanpa tindakan. Aborsi ini dibedakan menjadi 3 yaitu :

- a. Abortus imminens, pada kehamilan kurang dari 20 minggu terjadi perdarahan dari uterus atau rahim, dimana janin masih didalam rahim, serta leher rahim belum melebar (tanpa dilatasi serviks).
- b. Abortus insipiens, istilah ini kebalikan dari abortus imminens, yakni pada kehamilan kurang dari 20 minggu, terjadi pendarahan, dimana janin masih didalam rahim, dan diikuti dengan melebarnya leher rahim (dengan dilatasi serviks).
- c. Abortus inkompletus, keluarnya sebagian organ janin yang berusia sebelum 20 minggu, namun organ janin masih tertinggal didalam rahim.
- d. Abortus kompletus, semua hasil konsepsi (pembuahan) sudah di keluarkan.
- e. Abortus provokatus, berbeda dengan abortus spontanea yang prosesnya tiba-tiba dan tidak diharapkan tapi tindakan abortus

harus dilakukan. Maka pengertian aborsi atau abortus jenis provokatus adalah jenis abortus yang sengaja dibuat atau dilakukan, yakni dengan cara menghentikan kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar tubuh ibu atau kira-kira sebelum berat janin mencapai setengah kilogram.

Abortus provakatus dibagi menjadi 2 jenis:

- a) Abortus provokatus medisinalis/artificialis/therapeuticus. Abortus yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Di indonesia yang dimaksud dengan indikasi medik adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Indikasi medis yang dimaksud misalnya: calon ibu yang sedang hamil tapi punya penyakit yang berbahaya seperti penyakit jantung, bila kehamilan diteruskan akan membahayakan nyawa ibu serta janin, sekali lagi keputusan menggugurkan akan sangat dipikirkan secara matang.
- b) Abortus provokatus kriminalis, istilah ini adalah kebalikan dari abortus provokatus medisinalis, aborsi yang sengaja dilakukan tanpa adanya indikasi medik (ilegal). Dalam proses menggugurkan janin pun kurang mempertimbangkan segala kemungkinan apa yang akan terjadi kepada wanita / calon ibu yang melakukan tindakan aborsi ilegal. Biasanya pengguguran dilakukan dengan menggunakan alat-alat atau obat-obat tertentu.

- c) Abortus habitualis, termasuk abortus spontan namun habit (kebiasaan) yang terjadi berturut-turut tiga kali atau lebih.

1. Missed abortion

Kematian janin yang berusia sebelum 20 minggu, namun janin tersebut tidak dikeluarkan selama 8 minggu atau lebih, dan terpaksa harus dikeluarkan. Missed abortion digolongkan kepada abortus imminens.

2. Abortus septik

Tindakan menghentikan kehamilan karena tindakan abortus yang disengaja (dilakukan dukun atau bukan ahli) lalu menimbulkan infeksi. Perlu diwaspadai adalah tindakan abortus yang semacam bisa membahayakan hidup dan kehidupan.

D. Jenis Tindakan Aborsi

Secara garis besar, Ada dua macam tindakan aborsi yaitu :

1. Aborsi dilakukan sendiri

Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya dengan cara meminum jamu atau obat-obatan yang membahayakan janin atau dengan sengaja melakukan perbuatan yang menggugurkan janin.

2. Aborsi dilakukan orang lain

Orang lain disini bisa seorang dokter, bidan, dukun beranak.

D. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Peraturan mengenai tindak pidana aborsi diatur dalam berbagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 53 tentang Hak Anak menyatakan bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan

Pasal 15 tentang Kesehatan Keluarga

1. Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat dilakukan tindakan medis tertentu.
2. Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1(satu) hanya dapat dilakukan:
 - a. Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut.
 - b. Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli.
 - c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya.
 - d. Pada sarana kesehatan tertentu.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1) dan Ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Pasal 75 tentang Aborsi

1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu atau janin, yang menderita penyakit genetik berat atau cacat bawaan, maupun yang

tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan.

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
3. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76 tentang Aborsi

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir,kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan dan dengan izin suami, kecuali korban perkosaan.
- d. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri

Pasal 77 tentang Aborsi

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 2 (dua) dan ayat 3 (tiga) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 299 KUHP

1. Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati,dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
2. Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

3. Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalani pencarian maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu.

Pasal 341 KUHP

Seorang ibu yang, karena takut akan ketahuan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa anaknya, diancam, karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 342 KUHP

Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 343 KUHP

Kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 341 dan 342 dipandang, bagi orang lain yang turut serta melakukan, sebagai pembunuhan atau pembunuhan dengan rencana.

Pasal 346 KUHP

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 347 KUHP

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 348 KUHP

1. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 349 KUHP

Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Pasal 350 KUHP

Dalam hal pembedaan karena pembunuhan, karena pembunuhan dengan rencana, atau karena salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 344, 347 dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan Pasal 35 Nomor 1- 5.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum.

Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui

putusannya. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri negara hukum beserta sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, hakim itu harus aktif bertanya dan member kesempatan kepada pihak terdakwa yang diawali oleh penasihat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua itu dengan maksud menemukan kebenaran materil hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan lebih jauh bahwa sahnya putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi, melakukan grasi, dsb. Sedangkan di pihak lain, apabila ditelaah melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, HAM, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan. Putusan bebas adalah jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya jika terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa

diputus bebas (Pasal 191 Ayat (1) KUHP). Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*) berupa:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijkdwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum.

Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Makassar yaitu tepatnya di Pengadilan Negeri Makassar. Tempat penelitian tersebut dipilih oleh penulis , karena di anggap berkesesuaian judul yang diangkat oleh penulis

B. Jenis Jenis Dan sumber Data

Jenis data dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau lapangan, dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian pada objek penelitian, yakni data yang didapat dari keterangan atau penjelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi di kota Makassar.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, buletin, majalah, artikel-artikel diinternet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi Kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai

literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada tempat atau objek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan teknik wawancara yang dilakukan terhadap informan. Data diperoleh dengan melakukan tanya jawab langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi di Kota Makassar.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh atau data yang berhasil dikumpulkan selama proses penelitian dalam bentuk data primer maupun data sekunder dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sehingga hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Dari Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi No.68/Pid.B/2015/Pn.Mks

Sebelum penulis membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana dalam kasus putusan nomor 68/Pid.B/2014/PN.Mks yaitu sebagai berikut :

1. Posisi Kasus

Putusan pidana Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks tentang sebuah kasus mengenai tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh seseorang. Terdakwa dalam kasus ini bernama Muh.Ismail Damies pada hari Selasa tanggal 28 Oktober tahun 2014 bertempat di Sultan Alauddin II Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita atas persetujuannya dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saksi Ruslan dahlan (Anggota Polres Makassar) pemuda dan pemudi telah melakukan pengguran. mendapat informasi dari rumah sakit ada sepasang terjadi tindak pidana aborsi. Lalu saksi Ruslan dahlan (Anggota Polres Makassar) melakukan penyelidikan perihal kasus aborsi di Sultan Alauddin II Kelurahan.Mangasa Kecamatan.

Tamalate Makassar tepatnya di rumah kost terdakwa karena petugas kepolisian sebelumnya mendapat informasi dari Rumah Sakit Bhayangkara bahwa terdakwa telah melakukan pengguguran dan sedang pendarahan. lalu saat saksi Ruslan Dahlan sampai diatas kost, langsung menemukan terdakwa Muh. Ismail Damies berada diatas kost terdakwa yang mana terdakwa sedang merapikan dan membersihkan kamar yang telah dipenuhi darah. Saksi Ruslan Dahlan melakukan pemeriksaan diatas rumah kost terdakwa dan menemukan di rumah kost terdakwa tersebut beberapa barang yang kemudian disita sebagai barang bukti diantaranya 1 buah gunting, 1 papan obat kemasan merk cytotec, 2 lembar sarung, 1 lembar kain bandana, 1 gulung benang. yang menurut keterangan terdakwa adalah semua alat yang dipakai itu untuk menggugurkan kandungan dan memotong tali pusar bayi tersebut menggunakan gunting dan benang .

Bahwa pada saat diinterogasi, terdakwa mengatakan terdakwa sudah menguburkan bayi yang hasil aborsi tersebut Dan cara terdakwa melakukan pengguguran yaitu pertama-tama dengan memesan obat penggugur kandungan di internet setelah memesan obat itu. Tidak lama setelah itu langsung sampai di rumah kost tersangka dan menyuruh korban Mustabariyah untuk meminum obat merk Cytotec sebanyak 5 butir dan 3 butir untuk dimasukkan kedalam vagina nya. Setelah itu terdakwa dan korban menunggu reaksi obat tersebut. Sampai keesokan harinya pada hari selasa

tanggal 28 oktober 2014 pukul 07.00 wita saksi merasakan sakit dan ingin membuang air kecil lalu menuju ke WC dan pada saat itulah jabang bayi keluar dalam kandungan melalui vagina saksi dan langsung memotong tali pusar nya dengan menggunakan gunting lalu kemudian saksi Mustabariyah mengikat dengan benang lalu terdakwa membungkus bayii tersebut dengan menggunakan sarung lalu di letakkan di atas tempat tidur. Untuk menghindari rasa malu dan takut terhadap orang tua maka terdakwa melakukan hal tersebut. .

Bahwa berdasarkan atas temuan petugas Kepolisian tersebut, oleh karena terdakwa Muh. Ismail Damies tidak mempunyai izin untuk melakukan aborsi tersebut maka terdakwa Muh. Damies Ismail beserta barang buktinya dimankan di Polres Makassar untuk pemeriksaan selanjutnya.

2. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi

Mengenai bentuk pertanggung jawaban yang harus dilakukan terdakwa harus menjalankan pidana penjara akibat perbuatannya yang dilakukan terdakwa harus mempertanggungkan perbuatannya baik itu berupa pidana denda, sebab perbuatan yang dilakukannya secara terang – terangan telah dilarang oleh perundang undangan. Di dalam hal pertanggung pidana ada beberapa macam tanggung gugat antara lain:

1. *contractual liability* tanggung gugat ini timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban dan hubungan kontraktual yang sudah disepakati. Di lapangan kewajiban yang harus dilaksanakan adalah daya upaya maksimal, bukan keberhasilan, karena *health care provider*

2. Vicarius liability atau respondent superior ialah tanggung gugat yang timbul atas kesalahan yang dibuat oleh pelaku yang ada dalam tanggung jawabnya (*sub ordinate*) misalnya pelaku akan bertanggung gugat atas kerugian yang diakibatkan kelalaiannya.

3. *Liability in tort liability in tort* adalah tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum (*ontechtmatige daad*). Perbuatan melawan hukum tidak terbatas hanya perbuatan yang melawan hukum. Kewajiban hukum baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Akan tetapi termasuk juga yang berlawanan dengan kesusilaan atau berlawanan dengan ketelitian yang patut dilakukan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda orang lain

Menurut Professor W.L yang dikutip oleh Dagi menyatakan apabila seorang telah terbukti dan dinyatakan telah melakukan kesalahan maka ia akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Pengguguran kandungan yang dilakukan oleh terdakwa walaupun dengan mendapatkan persetujuan dari si`korban pada

dasarnya juga merupakan kesalahan karena mengenakan resiko yang tidak perlu dan tidak rasional kepada korban. Jika ternyata memang terdapat indikasi kesalahan yang dilakukan oleh seorang pelaku maka pemerintah yang berwenang dapat memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Begitupun secara hukum pidana seperti masyarakat yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan pidana ke Pengadilan Negeri. Manakalah kesalahan orang tersebut sudah memenuhi unsur-unsur pidana, maka perkaranya akan sampai ketangan pihak kepolisian untuk selanjutnya diproses sampai ke Pengadilan Negeri.

Sebelum sampai ke hadapan Pengadilan Negeri Makassar. Sebelumnya terdakwa terlebih dahulu diserahkan kepada pihak penyidik guna dilakukan penyidikan dan selanjutnya baru diserahkan kepada Kejaksaan dan Pengadilan Negeri. Hal ini untuk lebih idealnya lembaga atau badan yang berwenang menangani permasalahan ini. Menjaga Kepentingan dan kewajiban para masyarakat, namun profesi merupakan pekerjaan yang dapat menimbulkan resiko lain dimana pelanggaran hukum ini sering mengakibatkan kerugian pada masyarakat lain dan Negara berada diluar korban. Oleh karena itu pihak yang berwenang harus membuktikan kepada masyarakat bahwa mereka mampu bersikap objektif dan tidak menutup-menutupi kesalahan maka sanksi harus dijatuhkan dengan penuh wibawa agar pelanggaran hukum berkurang.

Tuntutan yang diajukan oleh jaksa dan itu harus dipertanggung jawabkan oleh terdakwa ini harus seberat mungkin hal ini disebabkan oleh karena terdakwa dianggap sudah mengetahui akan peraturan perundang undangan akan tetapi masih saja melanggarnya, hal ini dilakukannya pengguguran kandungan oleh terdakwa secara sembunyi – sembunyi jadi diharapkan kepada lembaga penegak hukum yang ada saat ini untuk dapat bekerja sama dalam memproses perkara seperti ini . Guna menanggulangi permasalahan pidana yang salah satunya adalah seperti kasus yang sedang penulis teliti , maka untuk pengawasan aborsi ini keikut sertaan masyarakat dalam membantu pengawasan masyarakat.

Adapun prosedur proses penentuan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa tersebut didalam prakteknya menggugurkan kandungan terhadap korban dapat digambarkan sebagai berikut : Bahwa si terdakwa Muh. Ismail Damies pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 bertempat di rumah kost terdakwa Jl.Sultan Alauddin Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Makassar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya. Dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas, yang mana sebelum terjadi peristiwa diatas, korban bernama Mustabariyah

berpacaran dengan terdakwa Muh. Ismail Damies yang telah berpacaran selama 2 tahun akan tetapi dalam berpacaran tersebut mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga korban Mustabariyah hamil sekurang kurangnya 5 (lima) bulan. Karena korban malu dengan keluarganya yakni hamil sebelum menikah lalu ia memesan obat penggugur kandungan melalui internet internet setelah memesan obat itu. Tidak lama setelah itu langsung sampai di rumah kost tersangka dan menyuruh korban Mustabariyah untuk meminum obat merk Cytotec sebanyak 5 butir dan 3 butir untuk dimasukkan kedalam vagina nya. Setelah itu terdakwa dan korban menunggu reaksi obat tersebut. Sampai keesokan harinya pada hari selasa tanggal 28 oktober 2014 pukul 07.00 wita saksi merasakan sakit dan ingin membuang air kecil lalu menuju ke WC dan pada saat itulah jabang bayi keluar dalam kandungan melalui vagina saksi dan langsung memotong tali pusar nya dengan menggunakan gunting lalu kemudian saksi Mustabariyah mengikat dengan benang lalu terdakwa membungkus bayii tersebut dengan menggunakan sarung lalu di letakkan di atas tempat tidur.

Selanjutnya melalui siding majelis terbatas , akan diputuskan apakah dari kasus tadi terbukti telah terjadi pelanggaran yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Bila ternyata benar, maka si pelaku akan dapat dikenakan sanksi pidana. Begitupun si pelaku digugat secara hukum pidana hasil siding itu dapat dijadikan

salah satu landasan pembuktian pemberat atau memperingan ancaman hukum yang didakwakan kepadanya.

Selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat di pergunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan perbuatan terdakwa tersebut dengan demikian maka perbuatan terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya untuk itu kepada terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan harus pula dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.

Mengenai ketentuan pidana yang akan di jatuhkan kepada terdakwa dan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus dipikul dan harus dilaksanakan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya .
2. Menyatakan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah gunting , 1 (satu) papan kemasan ebat merk CYTOTEC, 2(dua) lembar sarung, 1 (satu) kain bandana, 1 (satu) gulung benang.

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

B. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku dalam tindak pidana aborsi.

1. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa secara lisan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa sudah menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di perhadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan kejahatan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 348 KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan beberapa saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing masing antara lain sebagai berikut:

Saksi RUSLAN DAN DAHLAN dan saksi BASRI telah memberikan keterangan sesuai apa yang diberikan kepada penyidik dan keterangan telah termuat dalam berita acara persidangan dimana keterangannya pada pokoknya telah mendukung dakwaan penuntut umum dan memberatkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti dan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh terdakwa sebagai barang yang telah dibuat pada saat terdakwa melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka didapatlah fakta-fakta dipersidangan, dimana keterangan para saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah antara yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan dan berhubungan dengan keterangan terdakwa maka unsure-unsur yang terkandung dalam pasal dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi semua oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa dinyatakan terbukti secara menurut hukum dan hakim yakin akan kesalahan oleh terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya maka hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa tersebut sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya karena harus dihukum pula dalam membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa oleh Karena terdakwa ditahan penahanan terdakwa harus tetap dilanjutkan agar terdakwa tidak menghindari diri dari pelaksanaan hukum yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan seluruhnya haruslah dikurangkan dari hukuman yang akan dijatuhkan secara terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ajukan di depan persidangan haruslah dirampas dan dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap terdakwa terlebih dahulu hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan;

a. Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat tercelah dari sisi agama dan adat istiadat
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa belum pernah dihukum
 - Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya
 - Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya;
 - Sepanjang penglihatan Majelis, terdakwa bersikap sopan sekama persidangan;
 - Terdakwa mengetahui akan kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
 - Terdakwa dan saksi korban sudah dinikahkan oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 348 KUHP dan undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

2. Amar Putusan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 348 yang berhubungan dengan perkara ini .

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwwa MUH. ISMAIL DAMIES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggugurkan kandungan seorang wanita”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena ity dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan

5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah gunting, 1(satu) papan kemasan obat merk CYTOTEC, 2(dua) lembar sarung, 1(satu) lembar kain bandana, 1(satu) gulung benang, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-

3. Analisis Penulis

Menurut Penulis, terlihat pada bagaimana upaya dari hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap bentuk dakwaan JPU. kemampuan berpikir yuridik dari hakim terlihat pada bagaimana upaya hakim dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh JPU, kesesuaian pertimbangan dan putusan hakim dengan kaidah hukum, serta perbandingan antara putusan hakim, dengan tuntutan JPU. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Melihat rumusan pasal di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, seorang yang sedang dihadapkan dalam persidangan karena didakwa.

Melakukan tindak pidana tidak boleh dihukum jika tidak didasarkan oleh dua alat bukti yang sah dan dua alat bukti tersebut tidaklah cukup untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, melainkan harus ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti tersebut.

Mengenai alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHP di atas, dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) sebagai berikut;

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk, dan;
- e. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya dalam proses persidangan, berdasarkan dua alat bukti yang sah hakim harus membuktikan bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan/dituntutkan JPU kepada terdakwa telah terpenuhi oleh terdakwa sehingga menimbulkan keyakinan pada hakim bahwa terdakwa adalah orang yang dapat dihukum atas apa yang dilakukannya.

Namun, sebelum hakim sampai kepada kesimpulan tersebut, terlebih dahulu hakim harus mempertimbangkan aspek non-yuridis dan aspek yuridis. Pertimbangan hakim tersebut merupakan pendapat atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Mengenai pertanggungjawaban pidana, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan, hal tersebut adalah

a. Adanya Kesalahan.

Dapat atau tidaknya seorang dipidana dilihat dari faktor kesalahan/dapat dicela. Kesalahan dalam hukum pidana terdiri dari dua bentuk. Namun, sebelum membahas lebih jauh tentang bentuk

kesalahan tersebut, terlebih dahulu Penulis akan menguraikan tentang arti kesengajaan.

Kesengajaan (D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius dalam literature hukum pidana mempunyai dua arti yang masing-masing berbeda jangkauannya dari isinya, yaitu :

- a. Pengertian kesalahan dipakai sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan disamping sifat melawan hukum. Dalam hal ini, kesalahan didefinisikan sebagai sifat dapat dicela. Sifat dapat dicela dalam arti ini digunakan kalau kita berbicara tentang “tanpa sila” atau tentang alasan-alasan penghapusan pidana.
- b. Pengertian kesalahan dipakai juga untuk bagian khusus rumusan delik, yaitu sebagai sinonim dari sifat tidak berhati-hati, misalnya, Pasal 359 KUHP yang menyebutkan :

“karena kesalahannya atau kealpaannya, menyebabkan matinya orang lain”.

Sekalipun mirip, kealpaan disini tidak dipakai dalam arti pertama. Jadi, bukan sebagai sifat dapat dicela, melainkan sebagai sifat kurang berhati-hati. Lazimnya untuk pengertian kesalahan dalam arti sempit ini digunakan “kealpaan”.

Dalam hukum pidana, kesalahan dibagi menjadi kesengajaan dan kealpaan.

- kesengajaan terbagi atas tiga (bambang Poernomo, 1992 : 159), yaitu :

- a. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk);
- b. kesengajaan sebagai kepastian(opzet bijzekerheidsbewuutzijn);
- c. kepastian sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis).

Untuk kesengajaan sebagai maksud, si pelaku memang benar-benar menghendaki perbuatan dan akibatnya. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan baru dianggap ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari tindak pidana, tetapi dia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya. Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah keadaan tertentu yang semua mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi.

- Kealpaan terbagi atas dua D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius yaitu :
 - a. Kealpaan yang disadari, dan;
 - b. Kealpaan yang tidak disadari.

Dalam Putusan yang diteliti Penulis, hakim berpendapat bahwa terdakwa telah sengaja membawa korban kerumah dukun untuk menggugurkan kandungannya.

b. Bersifat Melawan Hukum

Melawan hukum berarti bertentangan dengan apa yang diatur dalam hukum. Sifat melawan hukum secara umum dikenal dalam dua bentuk yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Sifat melawan hukum formil D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius adalah “bahwa semua bagian tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi”

Sifat melawan hukum formil (D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius terjadi karena “ memenuhi rumusan delik dari undang-undang. Sifat melawan hukum formil merupakan syarat untuk dapat dipidanya perbuatan bersumber dari asas legalitas”.

Sementara itu, sifat melawan hukum materiil D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius berarti “melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu”.

Artinya bahwa sifat melawan hukum materiil terjadi ketika perbuatan telah memenuhi rumusan delik dan perbuatan dirasakan dan dianggap tidak patut atau tercela oleh masyarakat yang berbentuk tidak tertulis.

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana.

Alasan penghapusan pidana terdiri dari alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf ditujukan kepada keadaan diri si pelaku, sedangkan alasan pembenar ditujukan kepada keadaan perbuatan pelaku.

1) Alasan pemaaf.

a. Mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)..

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, pembentuk undang-undang membuat peraturan khusus untuk pembuat yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dirumuskan sebagai berikut :

1. Yang cacat dalam pertumbuhannya;
2. Yang terganggu karena penyakit

b. Daya paksa (Pasal 48 KUHP).

c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (2) KUHP.

d. Perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP).

2) Alasan pembenar.

a. Keadaan darurat.

b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1) KUHP).

c. Melaksanakan perintah perundang-undangan (Pasal 50 KUHP).

d. Melaksanakan perintah jabatan (Pasal 51 ayat 1) KUHP)

Dalam kasus yang diteliti Penulis, hakim berpendapat bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dianggap mampu bertanggung jawab. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan unsur kesengajaan, dan perbuatannya secara sah dan meyakinkan bersifat melawan hukum, dan hakim tidak melihat adanya alasan penghapusan pidana, baik terhadap diri pelaku, maupun terhadap perbuatan pelaku.

Atas dasar tersebut, hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan/dituntutkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur-unsur tersebut adalah :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan gugur atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya.

Berdasarkan hal tersebut, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melanggar Pasal 348 KUHP. Setelah unsur-unsur tersebut dianggap secara sah dan meyakinkan telah terbukti, maka dalam putusan hakim, harus juga memuat hal-hal apasaja yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa selama persidangan berlangsung. Hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Hal-hal yang bersifat meringankan adalah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

Dalam kasus yang diteliti Penulis, hakim berpendapat bahwa terdapat hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, yaitu :

- a. Hal-hal yang memberatkan :
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Hal-hal yang meringankan :
 - Terdakwa belum pernah dihukum

- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya
- Sepanjang penglihatan majelis, terdakwa bersikap sopan selama di persidangan
- Terdakwa mengakui akan kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi
- Terdakwa dan saksi korban sudah dinikahkan oleh orang tuanya
- Apa yang dipertimbangkan dan diputuskan oleh hakim tersebut di atas menurut Penulis adalah putusan sudah sah , dengan alasan sebagai berikut :
- 1) Pertama, surat dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum saling berkesesuaian dan disusun secara cermat.
- 2) Alasan kedua, bahwa hakim telah mempertimbangkan seluruh berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, dengan menganalisis dan mempertimbangkan mengenai bentuk dakwaan JPU. Selanjutnya dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa barang bukti akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan Menurut Penulis Penjatuhan putusan apapun bentuknya akan berpengaruh besar bagi pelaku, masyarakat, dan hukum.Oleh karena itu, semakin besar, jelas, dan banyak pertimbangan hakim, maka akan semakin mendekati keputusan rasional yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri.

- 3) Alasan ketiga, bahwa unsur yang dituntutkan oleh JPU semuanya dipertimbangkan oleh hakim, yang dipertimbangkan oleh hakim adalah unsur rumusan Pasal 348 KUHP, oleh karena itu Penulis berpendapat bahwa hakim memutus perkara dari apa yang didakwakan. Pasal 182 ayat (4) KUHP mengatur secara tegas bahwa "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan"..Berdasarkan hal tersebut, putusan hakim sah dimata hukum.
- 4) Alasan keempat, bahwa benar terdakwa mengantarkan korban ke kost sepupuhnya untuk menggugurkan kandungan korban denag meminum dan memasukkan obat CYTOTECH dalam vaginanya, dan jelas bahwa yang melakukan aborsi adalah terdakwa daan korban, jadi jika dihubungkan dengan unsur rumusan dalam Pasal 348 KUHP saja maka secara sah dan meyakinkan perbuatan terdakwa memenuhi unsur dalam pasal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka Penulis berkesimpulan bahwa :

1. Bentuk Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Studi Kasus Putusan Nomor 68/Pid.B/2015/PN.Mks) . Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa harus menjalankan pidana penjara akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya berupa pidana kurungan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7(tujuh)bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Sebab perbuatan yang dilakukannya secara terang-terangan telah dilarang oleh perundang- undangan sesuai dengan kejahatan dan perbuatan yang dilakukannya terhadap korban yang di atur dalam pasal 348 KUHP. Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik ituberupa pidana kurungan. Sebab perbuatan yang dilakukannya secara terang-terangan telah dilarang oleh perundang-undangan.

2. Dalam menjatuhkan putusan, hakim berdasar pada dua alat bukti yaitu keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, hakim beranggapan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana aborsi. Sementara menurut Penulis, pertimbangan-pertimbangan hakim sudah tepat dalam menjatuhkan putusan, karena itu pemeriksaan yang didasarkan pada dakwaan dan tuntutan yang mana tuntutan JPU menurut Penulis sah karena dakwaan dan tuntutan saling berkesesuaian. dan, hakim mempertimbangkan surat dakwaan dan tuntutan JPU, dan hakim mempertimbangkan seluruh berkas perkara, dan akibat langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Selain itu hakim mempertimbangkan semua unsur yang ada, yaitu hakim mempertimbangkan unsur Pasal 348 KUHP, selanjutnya menurut Penulis, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah memenuhi unsur yang dipertimbangkan oleh hakim.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dari itu penulis memberikan

saran agar:

1. Pemerintah mewajibkan pada semua sekolah formal mulai dari SMP sampai pada tingkat universitas mengadakan mata

pelajaran/mata kuliah studi mata pelajaran/mata kuliah tentang kesehatan, terutama berkaitan dengan aborsi.

2. Pemerintah pusat mengintruksikan kepada pemerintah daerah, untuk melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan bahaya pergaulan bebas dan aborsi khususnya kepada anak-anak usia remaja sampai dewasa.

3. Pemerintah melarang adanya iklan yang menjurus pada aborsi ilegal, misalnya saja obat yang dapat mempercepat menstruasi.

4. pemerintah perlu melaksanakan penyuluhan-penyuluhan ataupun workshop tentang bahaya aborsi dalam setiap lingkup peradilan umum khususnya Pengadilan Negeri sehingga para hakim dapat mengerti tentang bahaya aborsi ini minimal satu tahun dua sekali.

5. Dikenalnya *asas lex specialist derogate lex generalis*, hakim perlu memakai asas ini dalam memutuskan setiap perkara yang ia tangani. Selama ini putusan yang dibuat hakim hanyalah melihat pada KUHP semata tanpa mengindahkan bahwa ada undang-undang lain yang sifatnya lebih khusus (Undang-Undang Kesehatan).

DAFTAR PUSTAKA

Andrisman, Tri. 2005. *Asas-asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar

Lampung: CV. Sinar Sakti.

_____. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

_____. 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.

Moeljatno. 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya

Poernomo, Bambang. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana L*. Semarang: Yayasan Sudarto

Syarifudin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana

Ustman, Sabian. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Utarini, Adi. 1996. *Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Zain, Badudu. 1996. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Peraturan-Peraturan Perundangan

Undang Undang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Kesehatan

Kitab Undang Hukum Pidana

Sumber Lain

<http://www.aborsi.org/definisi.htm>.

<http://www.anneahira.com/pengertian-aborsi.htm>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. 1995, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2005. *Asas-asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: CV. Sinar Sakti.
- _____. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- _____. 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 3, Percobaan & Penyertaan*, Raja Grafindo: Jakarta
- (DR. Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*; Jakarta, PT. Rineka Cipta, Tahun 2004, Hal 88)
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti : Bandung
- Lamintang, P.A.F, dan Lamintang, Theo. 2010. *Pembahasan KUHP, Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*
- Moeljatno. 1987. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya
- Poernomo, Bambang. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Poernomo, Bambang. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hal 130)
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.

Saifullah. 2002, *Aborsi dan Permasalahannya, Suatu Kajian Hukum Islam*, Lembaga Studi Islam dan Masyarakat: Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 2005. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana L*. Semarang: Yayasan Sudarto

Syarifudin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana

Ustman, Sabian. 2008. *Menuju Penegakan Hukum Responsif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Utarini, Adi. 1996. *Kesehatan Wanita Sebuah Perspektif Global*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Zain, Badudu.
1996. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Peraturan-Peraturan Perundangan

Undang Undang Hak Asasi Manusia

Undang Undang Kesehatan

Kitab Undang Hukum Pidana

Sumber Lain

<http://www.aborsi.org/definisi.htm>.

<http://www.anneahira.com/pengertian-aborsi.htm>.

<http://www.ikatanapotekerindonesia-bali.com/main/index.php/berita/berita-terbaru/166-pp-61-tahun-2014-pp-aborsi-oleh-drs-i-gede-made-saskara-edi-m-psi-apt>